

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Qatar merupakan sebuah negara kecil beribukota di Doha merupakan negara berdaulat yang terbentang dari Semenanjung Persia di Jazirah Arab ke Teluk Persia (Arab), berbatasan dengan Arab Saudi, juga berbagi perbatasan laut dengan Bahrain, Iran, dan Uni Emirat Arab. Luas wilayah Qatar mencakup hingga 11.586 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi sebanyak 2,6 juta jiwa dengan warga negara Qatar yang menjadi minoritas (One World Nations Online, n.d.).

Qatar diperintah secara monarki absolut sejak pertengahan abad ke-19. Sistem Pemerintahan Qatar yang berbentuk Monarki Absolut yang berarti Qatar adalah negara yang dikepalai oleh seorang Raja yang disebut dengan Emir sebagai kekuasaan tertinggi atas semua keputusan politik. Sementara itu, untuk kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh Emir (Sahilna).

Pada 3 September 1971, Qatar resmi memperoleh kemerdekaannya secara penuh dari Inggris. Pada tahun 1995, Qatar mengalami revolusi dalam pemerintahannya ketika Mantan Emir Hamad bin Khalifa Al Thani meng kudeta ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani. Kemudian sejak tahun itu Hamad Al Thani menjabat sebagai Emir Qatar hingga pada tahun 2013. Dibawah kepemimpinannya, Qatar yang awalnya merupakan salah satu negara termiskin di Timur Tengah dengan pendapatan utama yang berasal dari sektor perikanan dan usaha mutiara hingga nama Qatar yang tak pernah terdengar di kancah internasional berubah menjadi negara yang kaya dengan sektor perminyakan yang diperhitungkan di panggung internasional. Qatar yang memiliki cadangan gas alam yang sangat berlimpah mulai dimonetisasi oleh Hamad bin Khalifah Al Thani hingga mampu menjadi negara eksportir gas alam cair terbesar di dunia dengan cadangan gas alam yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa, dimana warga negara Qatar hanya 313.000 orang (12%) dan 2,3 juta

lainnya adalah ekspatriat yang berada di Qatar sebagai pekerja terutama di sektor industri minyak dan konstruksi yang menjadi sektor paling menghasilkan di Qatar. Sumber kekayaan Qatar memang berasal dari industri pertambangan gas alam dan minyak bumi. Terbukti dengan Qatar menjadi pengeksport gas alam terbesar ke-2 di dunia dan menjadi negara pengeksport minyak bumi terbesar di dunia. Pada tahun 2005, Qatar membentuk sebuah perusahaan investasi bernama *The Qatar Investment Authority* yang bertujuan untuk mengalirkan dana ke berbagai sektor. Melalui hasil penjualan gas itulah Qatar menjadi negara terkaya di dunia dari segi pendapatan per kapita. Sebagai negara yang menjadi produsen minyak terbesar ketiga di dunia dan menjadi pemasok utama gas alam cair, dilansir dari *International Monetary Fund* pada tahun 2014, PDB per kapita nasional menjadi hampir dua kali lipat Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Qatar ini juga menandai peran politiknya di kawasan Jazirah Arab yang menciptakan *bargaining position* yang cukup strategis sehingga Qatar memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan luar negeri yang independen

sehingga membuat negara-negara tetangga seperti seperti Arab Saudi menjadi geram karena dianggap ingin berbeda dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Akibatnya, Qatar sudah beberapa kali mendapat sanksi dari negara-negara tetangga (Cahyani, Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017, 2019)

Menurut majalah Forbes, Qatar merupakan negara terkaya di dunia versi *World Bank*. Setelah menjadi negara yang cukup kaya dengan hasil pendapatan dari ekspor gas alam dan minyak bumi, kepentingan Qatar di kawasan pun mulai menurun dan Qatar mulai menjauhkan diri dari negara-negara Timur Tengah. Qatar mulai fokus pada pembangunan domestik negaranya dengan membangun sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit. Qatar juga meningkatkan mutu secara signifikan dalam berbagai sektor domestiknya seperti jaminan kesehatan, sistem pendidikan, hingga infrastruktur yang dibenahi secara total. Peningkatan mutu berbagai sektor domestik ini mampu membuat Qatar mengalahkan negara-negara kaya Timur Tengah

seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pada awalnya, Qatar dan negara-negara Teluk lainnya memiliki hubungan yang cukup baik. Namun, pada tahun 1995 dibawah kepemimpinan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, hubungan Qatar dengan negara-negara Teluk mulai mengalami ketidakcocokan dimulai dari adanya perbedaan visi yang memunculkan banyaknya kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang konfrontatif, terutama dengan Arab Saudi. (Ulrichsen K. C., 2014). Salah satu contohnya adalah Qatar yang berubah menjadi negara dengan kepemimpinan monarki revolusionis sedangkan Arab masih tetap bertahan dalam kepemimpinan tradisional monarki (Echague, 2015). Bergejolaknya hubungan Qatar dengan negara-negara Teluk mulai muncul ke panggung internasional pada tahun 2011 sejak terjadinya fenomena *Arab Spring*. Selain soal perbedaan sistem kepemimpinan, kebijakan Qatar yang menerima eks Ikhwanul Muslimin pada Juli 2013 serta kedekatan Qatar dengan Iran yang menjalin kerjasama ekonomi dalam produksi minyak bumi dan gas alam akhirnya membuat Arab

Saudi memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomasinya dengan Qatar pada awal 2014 karena anggapan Arab Saudi bahwa setiap negara yang membangun aliansi dengan Iran akan secara otomatis menjadi musuhnya.

Pada November 2014, hubungan Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya mulai kembali stabil karena menemukan resolusi konflik jangka pendek melalui negoisiasi dan persetujuan Qatar untuk menarik diplomatnya dari Tehran yang diikuti dengan dikeluarkannya orang-orang eks Ikhwanul Muslimin sebagai bentuk komitmen Qatar untuk penguatan aliansi negara-negara Timur Tengah melalui *Gulf Cooperation Council* (GCC) (Ulrichsen K. C., 2014). Namun, Qatar kembali bergejolak dengan Arab Saudi yang ditengarai oleh kegiatan diplomasi yang dilakukan Qatar dan dugaan bahwa Qatar mendukung aliran-aliran ekstrimis seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, Kelompok Hamas, dan kelompok radikal lainnya. Tak hanya membangun hubungan diplomasi, Arab Saudi juga menduga Qatar membantu secara finansial berupa aliran dana untuk pembelian senjata.

Qatar juga dianggap terlalu mencampuri urusan internal negara-negara anggota GCC seperti perang yang terjadi di Yaman, Suria, hingga Mesir. Merujuk dari banyaknya ketidakcocokan arah politik dengan Qatar, akhirnya pada Juni 2017, Arab Saudi kembali memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar yang diikuti oleh Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Pemutusan hubungan diplomasi ini membuat gejolak di Timur Tengah semakin memanas.

Tak hanya memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar, empat negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) yaitu Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir juga memberlakukan tindakan koersif melalui sanksi ekonomi terhadap Qatar dengan memberlakukan blokade darat, laut, dan udara. Pemblokadean ini pun diikuti oleh ajuan 13 syarat kepada Qatar oleh Arab Saudi sebagai syarat untuk terbebas dari blokade. Namun, dengan tegas Qatar menolak untuk mengikuti tuntutan Arab Saudi tersebut karena dianggap terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Adapun 13 syarat tersebut adalah (1) Qatar harus membatasi hubungan diplomasinya

dengan Iran bersamaan dengan mengeluarkan anggota Garda Revolusi Iran dari Qatar dan menghentikan kerjasama gabungan militer dengan Iran. Qatar diperbolehkan berhubungan dengan Iran hanya dalam sektor perdagangan sesuai dengan sanksi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Internasional, (2) Qatar memutuskan semua hubungan dengan kelompok terrorism Ikhwanul Muslimin, (3) Qatar menghentikan siaran Al-Jazeera, (4) Qatar menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar baik secara langsung maupun tidak langsung seperti *Arabi21*, *Rassd*, *Al Araby Al-Jadeed*, dan *Middle East Eye*, (5) Qatar mengakhiri kerjasama militer gabungan dengan Turki di Qatar, (6) Qatar menghentikan berbagai bentuk sarana pendanaan baik untuk individu, kelompok, ataupun organisasi yang dianggap Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Amerika Serikat sebagai teroris, (7) Qatar menyerahkan tokoh teroris dan individu yang selama ini dicari oleh pihak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Amerika Serikat serta turut membekukan aset mereka, menyerahkan informasi tempat tinggal dan detail gerakan pendanaan teroris, (8) Qatar mengakhiri campur



tangganya pada permasalahan negara berdaulat, (9) Qatar menghentikan kontak dengan semua pihak yang menjadi oposisi politik pemerintahan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, serta menyerahkan semua dokumen yang merinci kontak Qatar sebelumnya dan dukungan yang ditunjukkan kepada pihak tersebut, (10) Qatar membayar reparasi dan kompensasi atas kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kerugian-kerugian hingga hilangnya nyawa, (11) Qatar harus memosisikan diri sejajar dengan negara-negara Teluk dan negara Arab lainnya secara militer, politik, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014, (12) Qatar menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah diserahkan kepada Qatar, dan (13) Qatar menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, kemudian akan dilakukan perkuartal setelah tahun kedua selama 10 tahun dan akan terus dilakukan pemantauan kepatuhan terhadap Qatar (Octaviane, 2019). Dalam ke-tiga belas tuntutan tersebut, negara-negara penuntut tidak menuliskan tindakan apa yang

akan negara-negara penuntut lakukan bila Qatar tidak memenuhi segala tuntutan ini dalam kurun waktu yang diberikan, yaitu dalam 10 hari.

Arab Saudi memprediksikan bahwa Qatar akan tunduk dan memenuhi ketiga belas tuntutan yang disampaikan oleh Kuwait kepada Qatar tersebut karena hanya dengan itu sanksi ekonomi berupa pemblokadean darat, laut, dan udara yang dilakukan Arab Saudi dan sekutu terhadap Qatar dapat dibuka kembali. Namun, tanggapan Qatar tidak sesuai prediksi Arab Saudi. Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain tersebut karena dianggap sebagai tuntutan yang tidak berdasar dan dianggap sebagai usaha Arab Saudi untuk mengontrol Qatar agar Arab Saudi tetap mendominasi negara-negara kawasan Timur Tengah.

Qatar adalah sebuah negara yang terletak di kawasan terkering di dunia dengan curah hujan yang sangat rendah, tingkat penguapan yang tinggi dan kurangnya lahan yang subur membatasi kemampuan Qatar dalam menghasilkan makanan sehingga Qatar harus mengantungkan keberlangsungan pangannya pada impor untuk

memenuhi 90 persen kebutuhan konsumsi makanan dan airnya. Sebagian besar kebutuhan pangan tersebut di impor dari negara tetangganya, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sekitar 40 persen bahan impor makan tersebut harus melewati lintasan perbatasan Qatar-Saudi. Sebagai negara pengimpor makanan, ancaman terbesar Qatar adalah ketergantungan pada satu atau lebih faktor penghambat perdagangan seperti akses darat, laut, dan udara. Pemblokadean jalur darat, laut, dan udara yang dilakukan Arab Saudi tentu berdampak pada keberlangsungan pangan dan pasar Qatar karena keamanan pangan jangka panjang Qatar bergantung pada terbukanya akses jalur pengiriman tersebut.

Selain mengenai impor kebutuhan pangan, Qatar juga terletak di antara dua negara yang cukup berpengaruh di kawasan Timur Tengah, Iran dan Arab Saudi. Kedua negara yang terus bersaing untuk mendominasi kawasan Timur Tengah. Dalam upaya menjaga keamanannya, Qatar terus berupaya untuk melibatkan diri dalam kebijakan luar negeri aktif melalui kegiatan mediasi, branding dan

pembangunan citra, hingga memainkan strategi guna menyeimbangkan kekuatannya dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi.

Pada 5 Januari 2021, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan untuk mengakhiri blokade mereka terhadap Qatar yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun terakhir ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Al Ula pada KTT ke-41 Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Teluk Arab (GCC) (Kabbani, 2021). Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mengatakan bahwa penandatanganan Deklarasi Al Ula pada KTT ke-41 ini didasarkan oleh kebutuhan mendesak bagi negara-negara Teluk untuk menyatukan upaya mereka, terutama dalam menghadapi ancaman Iran di wilayah Timur Tengah (Khalid, 2021).

Sanksi ekonomi berupa pemblokadean darat, laut, dan udara hingga krisis diplomasinya yang terjadi tentu memberi dampak pada negara Qatar, terutama dalam hal pangan dimana selama ini Qatar mengimpor bahan pangan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun, menurut para pakar dan analisis strategis menegaskan bahwa

Qatar telah berhasil dalam mengelola krisis diplomasi yang dihadapinya. Tak hanya mampu bertahan, Qatar juga mampu mengagalkan tuntutan Arab Saudi dan sekutu yang dinilai dapat melemahkan kedaulatan, ekonomi, dan kohesi sosialnya (QNA, 2018).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai: **Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Qatar dalam menghadapi dampak krisis diplomasinya dengan Arab Saudi?**

## **1.3. Kerangka Teori**

### **1.3.1 Kerjasama Internasional oleh KJ Holsti**

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, kajian hubungan internasional semakin meluas dan kompleks, tidak hanya semakin meluasnya cakupan aktor dipanggung internasional, namun juga kajian mengenai pola hubungan internasional di setiap aktor. Jika saat Perang Dunia II, aktor hubungan internasional mendominasi aktifitasnya dengan perang, militer, dan gencatan senjata, Pasca Perang Dunia II, panggung internasional banyak menjalin hubungan kerjasama atau corporate antar negara maupun aktor lainnya. Berawal dari pecahnya

Perang Dingin yang membuat negara-negara saat itu banyak memutuskan untuk melakukan kerjasama internasional dengan memperbanyak aliansi dengan tujuan membangun kekuatan setiap masing-masing pihak sehingga munculnya dua blok kuat, blok barat dan blok timur. Keputusan banyak negara untuk membentuk aliansi dan kerjasama internasional tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan kondisi masing-masing negara yang tidak dapat berdiri sendiri sepenuhnya tanpa adanya bantuan dari luar (Nur, 2018).

Dalam hubungan internasional, kerjasama adalah hal yang penting dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional karena pada dasarnya suatu negara tidak mampu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Suatu negara selalu membutuhkan negara lain untuk menjalin kerjasama karena setiap negara memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan potensi ini bisa saling memenuhi kebutuhan antar negara. Perbedaan sumber daya alam antarnegara yang saling menjalin kerjasama internasional juga dapat

membantu pembangunan negara dan pemenuhan kebutuhan warganya. Adanya interdependensi antarnegara juga menjadi kan kerjasama sebagai kebutuhan seperti kegiatan ekspor dan impor (Wulandari, 2017).

Untuk melakukan kerjasama internasional, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Harus menghormati kepentingan nasional masing-masing pihak yang terlibat
- b) Memiliki keputusan bersama yang diperlukan untuk komunikasi dan konsultasi secara berkelanjutan.

Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dibandingkan komitmen (Oktora, 2019).

Menurut K.J. Holsti dalam bukunya *International Politics* (1988), Holsti menyatakan bahwa Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pandangan bahwa adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, dan tujuan yang saling bertemu dan menghasilkan sesuatu untuk dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Harapan suatu bangsa bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negaranya untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Perjanjian tentang masalah khusus antara dua atau lebih negara untuk mengeksploitasi persamaan kepentingan.
- d) Kumpulan aturan transaksional tentang implementasi perjanjian di masa depan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan persetujuan mereka (Holsti, 1988).

Melalui definisi ini, dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional mencakup hubungan antar negara atau yang bukan



negara, dimana di dalamnya memiliki sebuah tujuan atau kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama inilah yang kemudian memenuhi kebutuhan masing-masing negara atau pihak yang terlibat.

Beberapa hal menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan kerjasama internasional, yaitu:

- a) Adanya kemajuan dibidang teknologi yang menjadikan semakin mudahnya hubungan antar negara dapat terjalin sehingga meningkatkan ketergantungan satu pihak dengan yang lainnya.
- b) Adanya kemajuan dan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya.
- c) Adanya perubahan sifat peperangan berupa suatu keinginan bersama untuk saling memberi perlindungan

dan membela diri dalam bentuk jalinan kerjasama internasional.

- d) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi dalam memudahkan pemecahan masalah yang sedang dihadapi (Koesnadi, 1977).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Agoes (2003), kerjasama internasional memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akibat tidak berimbangnya kekayaan alam dan kemajuan industri, sehingga menjalin kerjasama internasional adalah langkah yang dapat ditempuh untuk memenuhi ketidakberimbangan diberbagai sektor tersebut. Hal ini sangat tepat untuk studi kasus krisis diplomasi Qatar tahun 2017. Dimana sebelum terjadinya krisis diplomasi, Arab Saudi adalah negara yang menjadi negara suplai bagi bahan pangan Qatar. Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang juga memutus hubungan diplomasinya dengan Qatar juga merupakan negara yang menyuplai bahan pangan Qatar. Selain bahan pangan, rute penerbangan

dan perdagangan yang juga ditutup oleh Arab Saudi juga menyusahkan Qatar.

#### **1.4. Hipotesa**

Dari uraian diatas saya menarik hipotesis bahwa strategi yang dilakukan oleh Qatar dalam menghadapi dampak krisis diplomasi dengan Arab adalah dengan menjalin kerjasama internasional dalam memenuhi kebutuhannya yang harus terhambat akibat pemutusan hubungan diplomasi oleh beberapa negara Timur Tengah. Seperti menjalin kerjasama dengan Iran dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang sebelum krisis diplomasi disuplai oleh Arab Saudi, dan kerjasama dengan Turki untuk mendapat bantuan militer sebagai persiapan apabila kemungkinan terburuk terjadi.

#### **1.5. Metodologi Penelitian**

Pada proses penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penulisan laporan berupa skripsi. Pada skripsi yang berjudul Strategi Qatar dalam Menghadapi Krisis Diplomasi dengan Arab Saudi, penulis menggunakan proses pengumpulan data berupa studi literatur, dimana sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian penulis didapat dari literatur seperti buku-buku, jurnal baik online maupun berbentuk fisik, majalah, artikel online, maupun offline, dan dari berbagai sumber dari internet yang berkaitan dengan kajian dalam penulisan tugas akhir ini.

Akhirnya, penulis menyajikan data-data dan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam bentuk penjabaran ilmiah yang utuh yang didahului oleh tulisan mengenai gambaran singkatnya melalui latar belakang.

#### **1.6. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang dilakukan penulis akan berdasar pada rentang waktu 10 tahun terakhir terutama pada tahun 2017 dimana Arab Saudi dan sekutu mulai memberlakukan blokade udara, darat, dan laut di Qatar hingga mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk mengakhiri krisis yang kemudian ditolak oleh Qatar.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab memiliki sistematika penulisan tersendiri.

**BAB 1. Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2. Dampak Krisis Hubungan Diplomasi Qatar dengan Arab Saudi** yang berisikan penjabaran mengenai dinamika hubungan Arab Saudi dengan Qatar dan bagaimana dampak krisis hubungan diplomasi antara Qatar dengan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah baik dalam sektor politik maupun ekonomi.

**BAB 3. Strategi yang Dilakukan oleh Qatar dalam Menghadapi Krisis Diplomasi** yang berisi strategi apa saja yang dilakukan oleh Qatar untuk bertahan dalam menghadapi krisis diplomasinya dan apa yang dihasilkan Qatar dengan solusi tersebut.

**BAB 4. Kesimpulan** yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi.